

ABSTRAK

Hilirisasi Nikel menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah Indonesia dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kewajiban pelaksanaan hilirisasi nikel ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menempatkan perizinan usaha pertambangan sebagai instrumen utama pengendalian kegiatan pertambangan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai bentuk ketidakpatuhan pemegang Izin Usaha Pertambangan dalam pelaksanaan hilirisasi nikel yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan kerugian sosial bagi masyarakat sekitar wilayah tambang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan izin usaha pertambangan dalam pelaksanaan hilirisasi nikel, strategi serta prosedur pengawasan, dan penegakan hukum terhadap ketidakpatuhan pemegang izin. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pengaturan perizinan dan pengawasan hilirisasi nikel telah diatur secara sistematis, namun optimalisasi pengawasan di lapangan belum optimal akibat sentralisasi kewenangan dan keterbatasan pengawasan langsung. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan yang terintegrasi, peningkatan transparansi, serta konsistensi penegakan hukum agar kebijakan hilirisasi nikel dapat berjalan secara berkelanjutan dan berkeadilan.

Kata Kunci : Hilirisasi Nikel, Izin Usaha Pertambangan, Pengawasan Pertambangan, Ketidakpatuhan Hukum, Hukum Pertambangan

ABSTRACT

Nickel downstreaming has become one of the Indonesian government's strategic policies to increase the added value of mineral resources and to promote national economic growth. The obligation to implement nickel downstreaming is reaffirmed in Law Number 2 of 2025 concerning the Fourth Amendment to Law Number 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining, which places mining business licensing as the primary instrument for controlling mining activities. However, in practice, various forms of non-compliance by Mining Business Permit holders in the implementation of nickel downstreaming are still found, resulting in environmental degradation and social losses for communities surrounding mining areas. This research aims to analyze the regulation of mining business licensing in the implementation of nickel downstreaming, the strategies and procedures of supervision, and law enforcement against permit holders' non-compliance. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that, normatively, the regulation of licensing and supervision of nickel downstreaming has been systematically regulated; however, the effectiveness of on-site supervision has not been optimal due to the centralization of authority and limitations in direct supervision. Therefore, strengthening integrated supervisory mechanisms, enhancing transparency, and ensuring consistent law enforcement are necessary to ensure that the nickel downstreaming policy is implemented in a sustainable and equitable manner.

Keywords: nickel downstreaming; mining business license; mining supervision; legal non-compliance; mining law.